

REFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI INDONESIA PADA ASPEK TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Fadli Arif

Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Disampaikan Kegiatan Sekolah Pengawasan dan Pemantauan
Pengadaan Publik (SP3) September – Oktober 2021

Jakarta, 22 September 2021

7

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- 1 EFISIEN
- 2 EFEKTIF
- 3 TRANSPARAN
- 4 TERBUKA
- 5 BERSAING
- 6 ADIL
- 7 AKUNTABEL

Prinsip Meningkatkan Integritas Pengadaan

- **Transparan**
- Manajemen yang Baik
- Pencegahan Pelanggaran, Kepatuhan, dan Monitoring
- **Akuntabilitas** dan Pengendalian



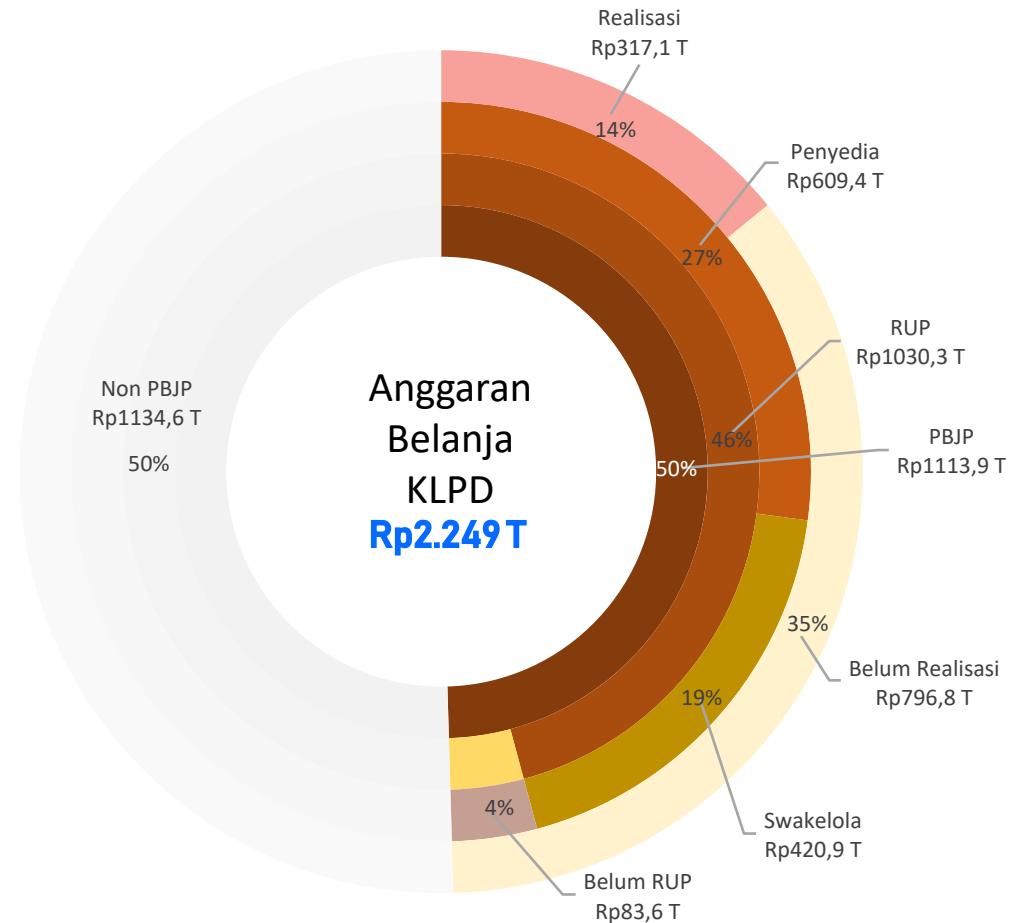
Mengapa Pengadaan harus Transparan dan Akuntabel?

Governments spend an estimated USD 9.5 trillion annually through public contracts, but there is minimal information publicly available as to how, when, and where this money is spent.

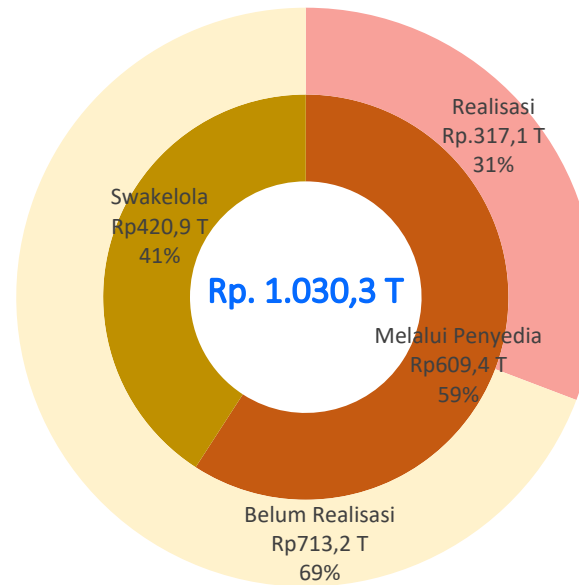
Di Indonesia, Nilai anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah sekitar 30% dari anggaran negara (MCA, 2014). Diperkirakan 60% bantuan pembangunan asing dihabiskan untuk pengadaan barang dan jasa (Buehler, 2012). Namun, sistem pengadaan publik di Indonesia sering dirusak dengan ketidakefisienan dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang mengakibatkan kerugian sekitar \$15 miliar per tahun (MCA, 2014).



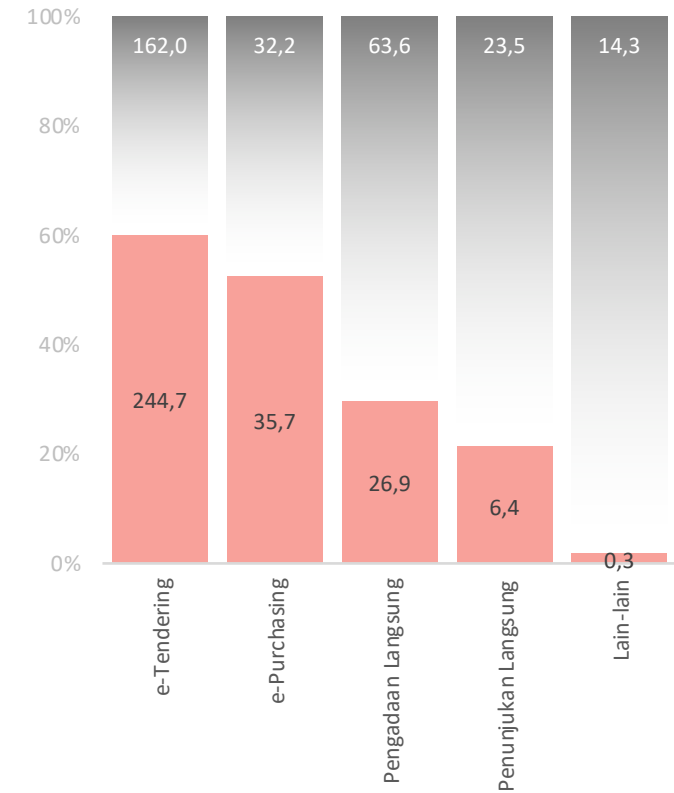
Profil Pengadaan NASIONAL TA 2021



RUP PBJ Nasional



Realisasi Nasional melalui Penyedia

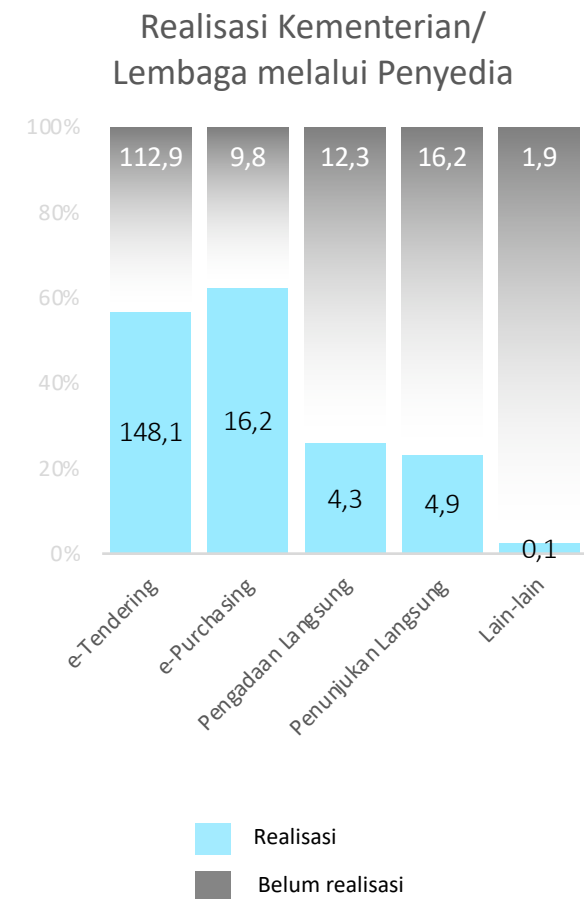
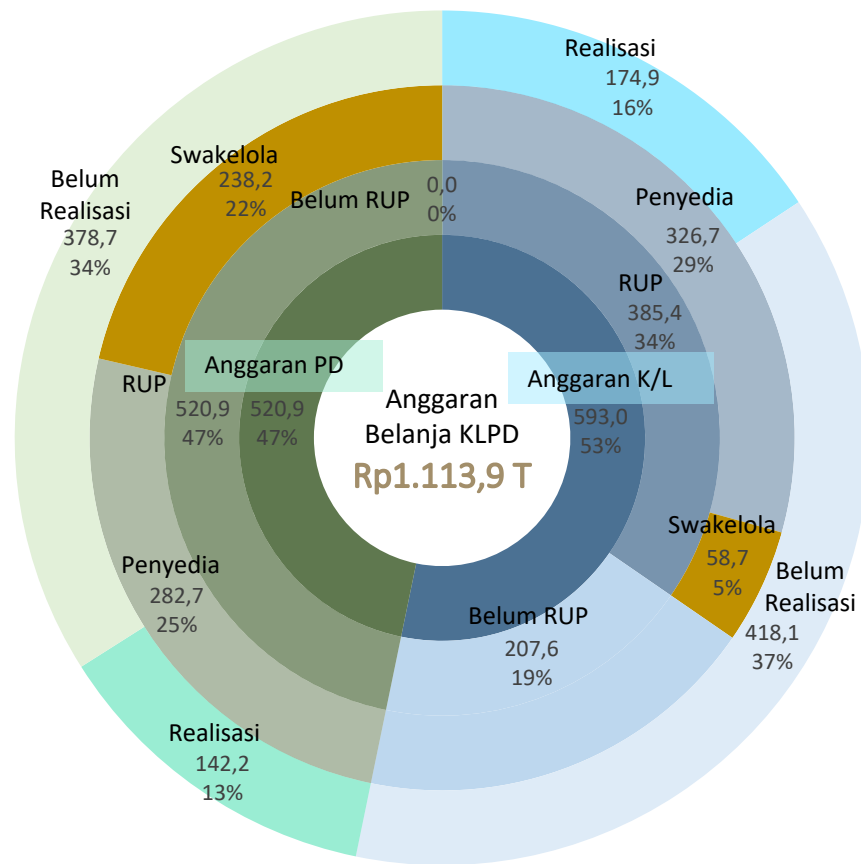
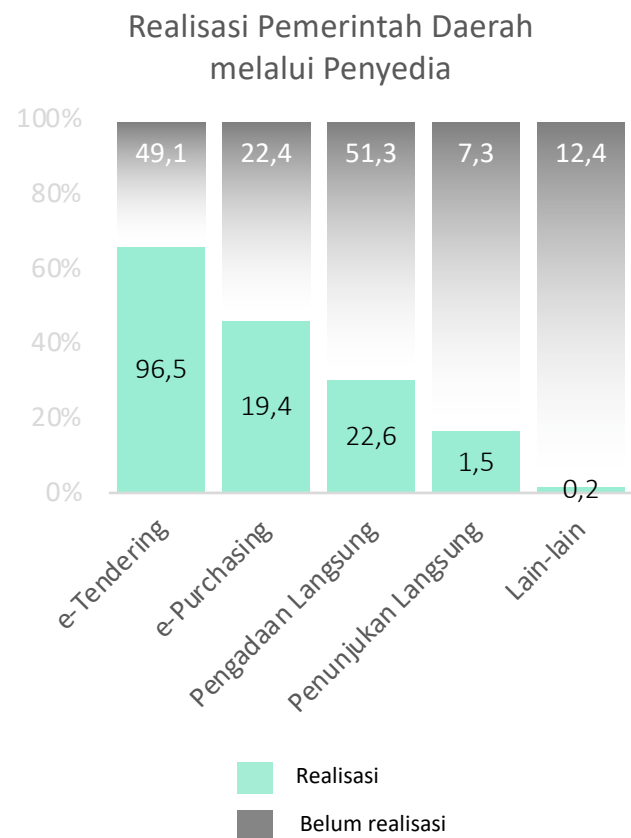


Realisasi
Belum realisasi

*dalam triliun

* data RUP PEMDA sebesar 644,92 T

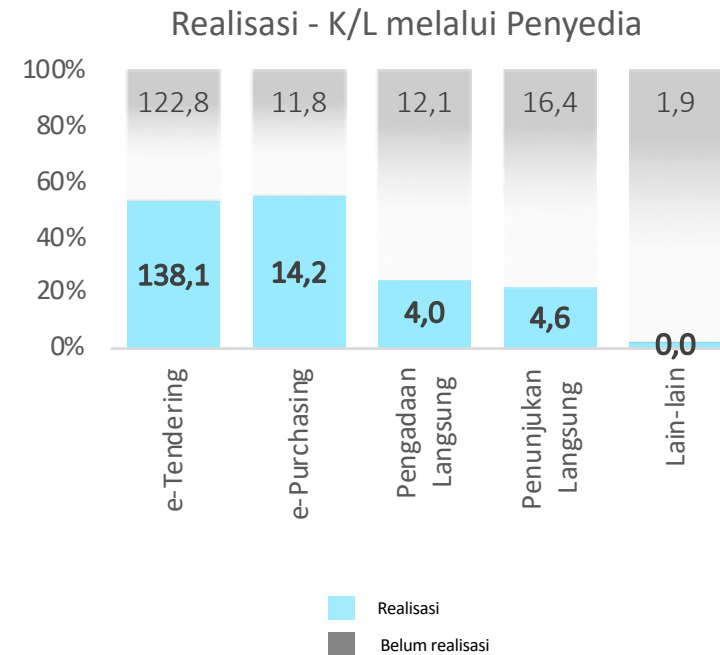
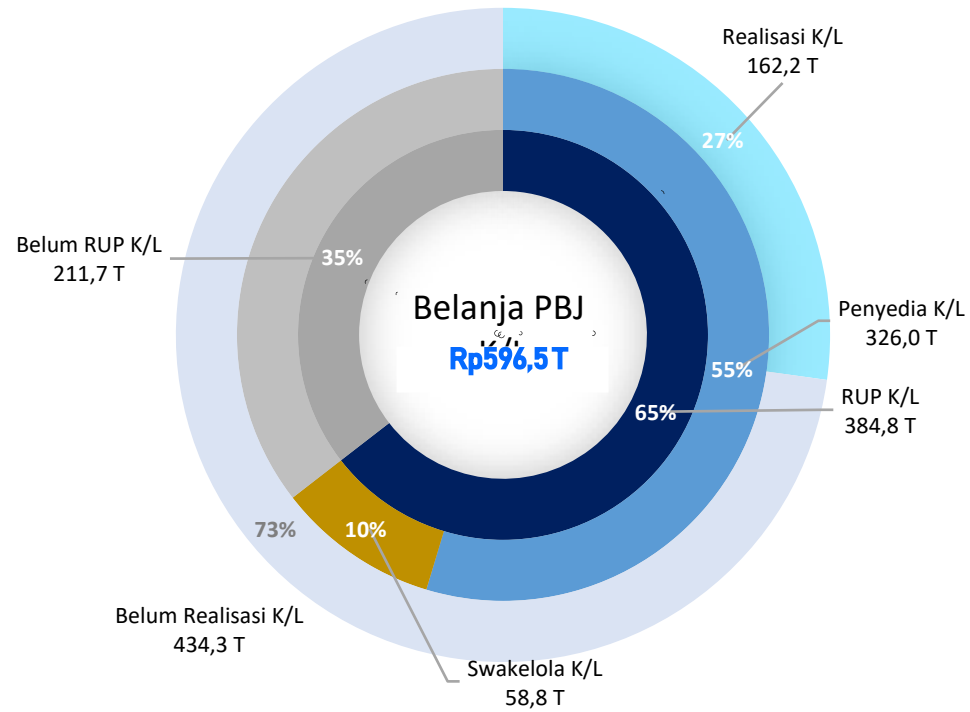
Profil Pengadaan KEMENTERIAN/LEMBAGA & PEMDA TA 2021



* data RUP PEMDA sebesar Rp644,92 T melebihi 100% dari nilai anggaran belanja pengadaan PEMDA yang hanya sebesar 520,89 T,

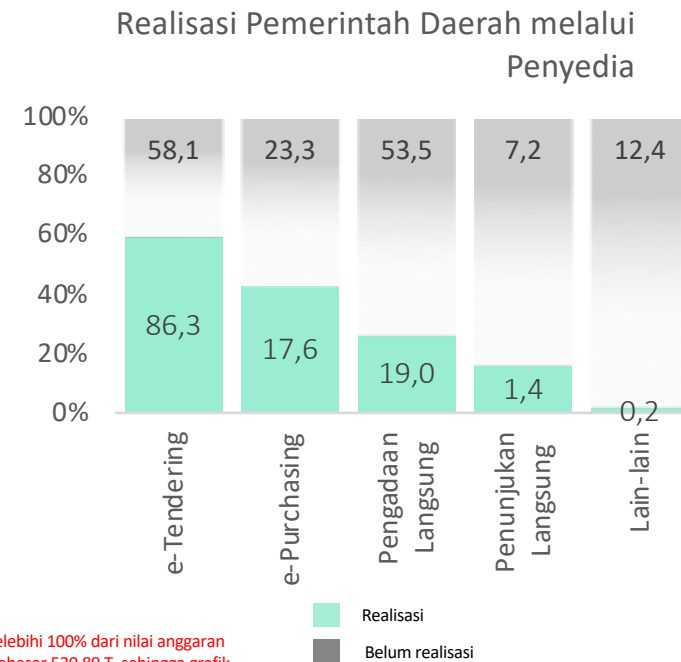
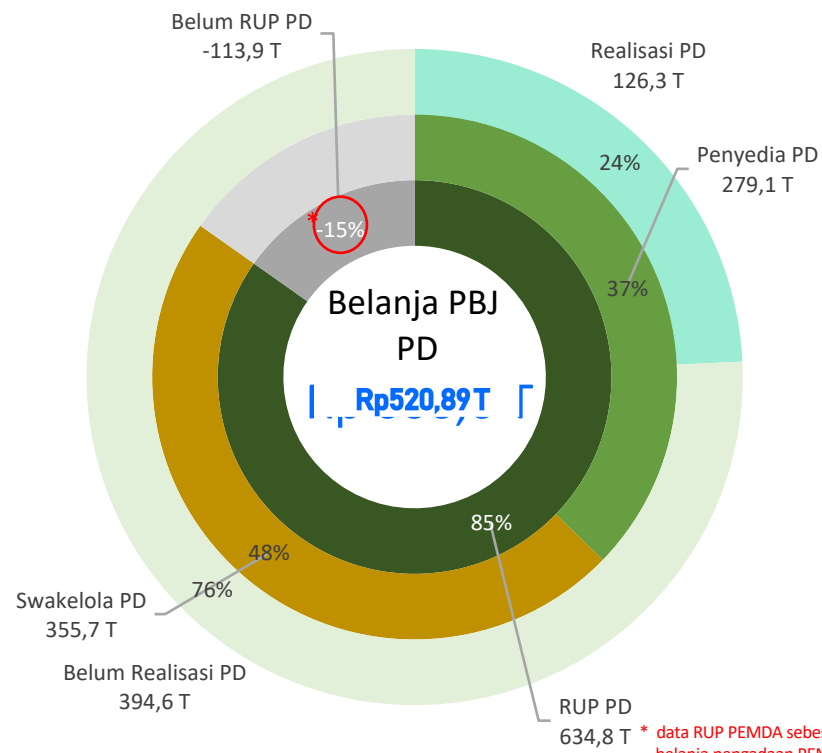
*dalam triliun

Profil Pengadaan KEMENTERIAN/LEMBAGA TA 2021



*dalam triliun

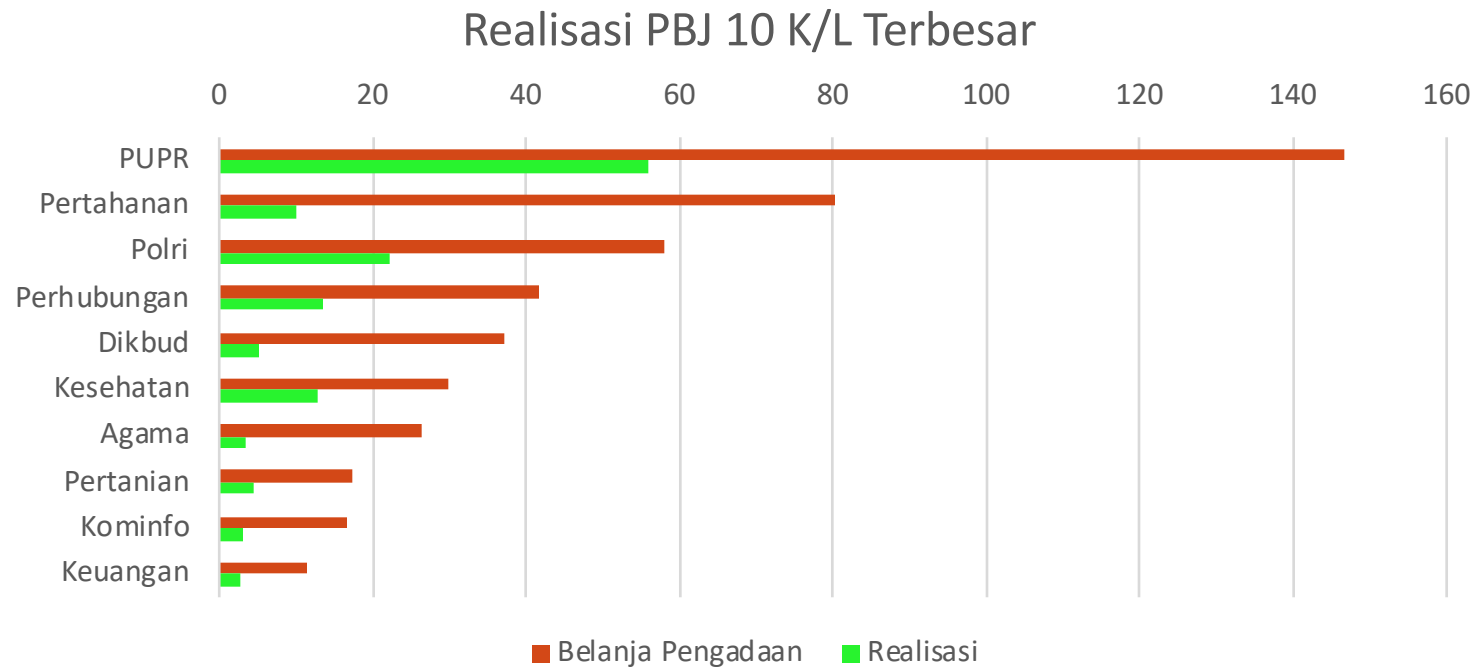
Profil Pengadaan PEMERINTAH DAERAH TA 2021



* data RUP PEMDA sebesar Rp634,77 T melebihi 100% dari nilai anggaran belanja pengadaan PEMDA yang hanya sebesar 520,89 T, sehingga grafik mengalami tampilan minus

*dalam triliun

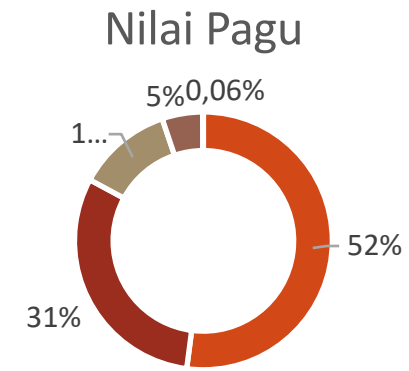
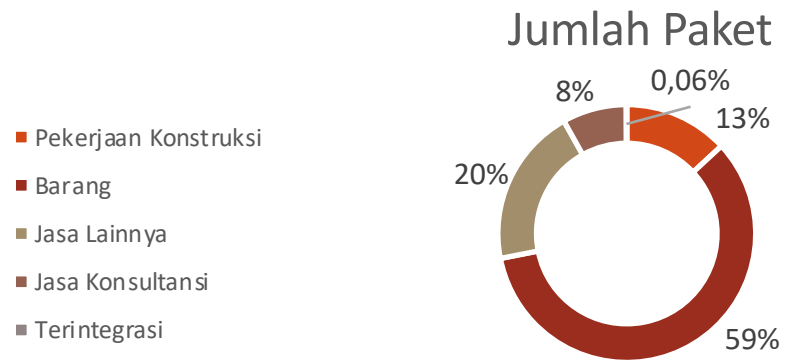
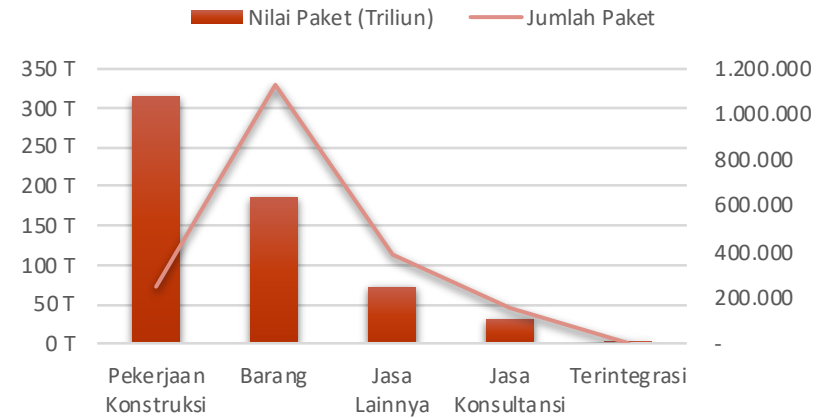
10 Profil Belanja PBJP Kementerian/Lembaga Terbesar



(satuan dalam triliun)

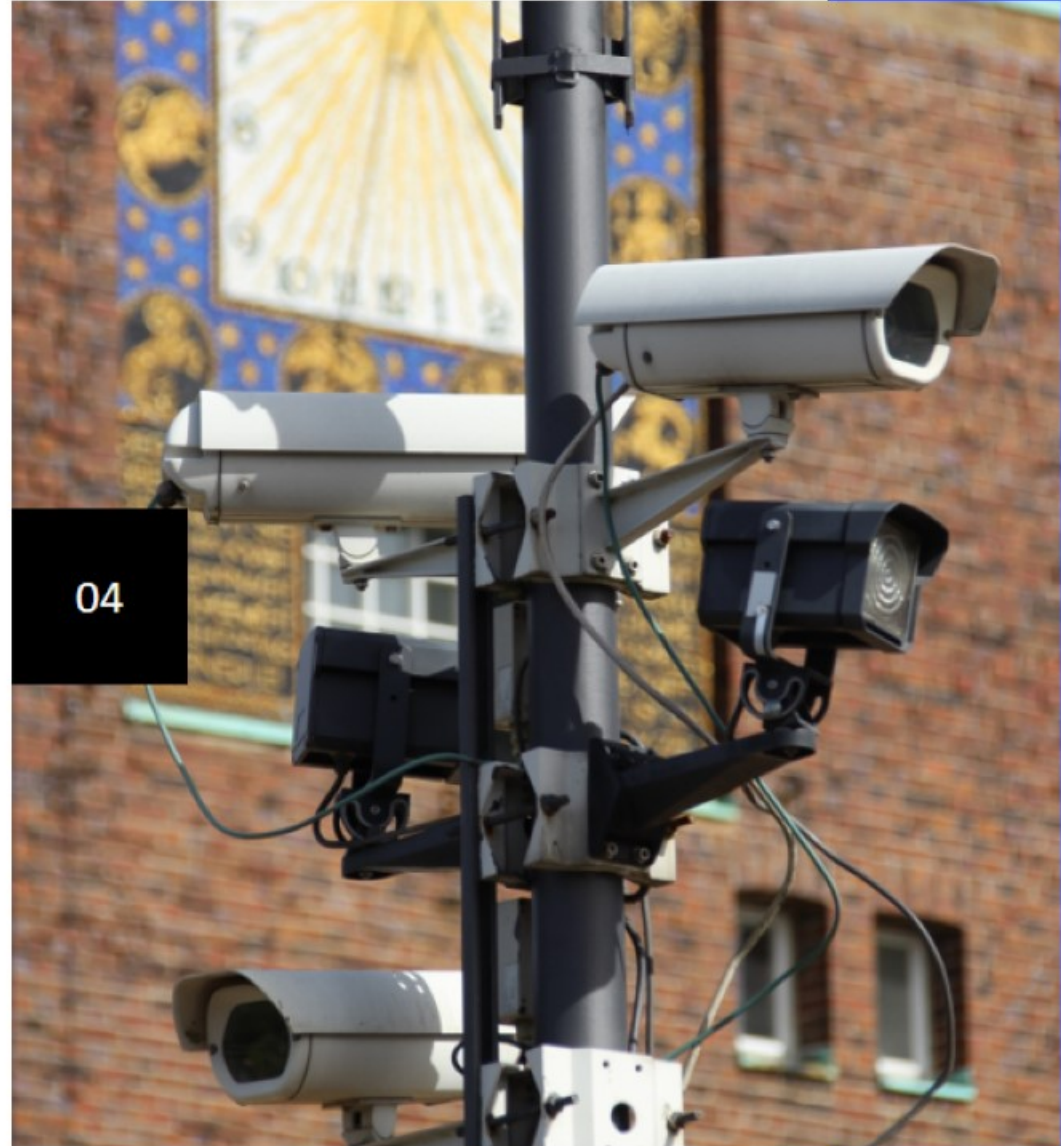
Profil Belanja PBJP Nasional Berdasarkan Jenis Pengadaan

NO	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket
1	Pekerjaan Konstruksi	252.360	Rp315.075.692.807.671
2	Barang	1.130.419	Rp186.257.141.574.566
3	Jasa Lainnya	384.360	Rp72.424.906.602.064
4	Jasa Konsultansi	154.761	Rp30.975.039.871.924
5	Terintegrasi	1.234	Rp338.357.177.347
Total		1.923.134	Rp605.071.138.033.572



INTEGRITY AND TRANSPARANCY

04





FOR
DEMOCRACY
#stopTTIP

TRANSPARENCY
NOW!

TRANSPARENZ FÜR
MEHR DEMOKRATIE
#STOPTTIP

ACCESS
DENIED

LA TRANSPARENCE
POUR LA DEMOCRATIE
#STOPTTIP

#NoT
ACCESS
DENIED

TTIP

¡¡¡QUEREMOS ENTRAR!!!
STOP SECRETISMO EN LAS
NEGOCIACIONES
#QueTienenQueEsconder
#STOPTTIP
CAMPAÑA CONTRA EL
TRATADO DE COMERCIO E INVERSIÓN
UNIÓN EUROPEA - ESTADOS UNIDOS
PODEMOS

TTIP
OPEN THE
TO TRANSPARENCY
#STOPTTIP

TRANSPARENCY
FOR
CBAC

OPEN THE DOOR
TO TRANSPARENCY
#STOPTTIP



Transparansi merupakan prinsip utama pengadaan yang berkualitas. Proses pengadaan yang terbuka dan transparan meningkatkan persaingan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi ancaman ketidakadilan atau korupsi.

Ban Ki Moon

Supplement to the 2011 Annual Statistical
Report on United Nations Procurement

PRAKTIK TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



MEMPUBLIKASIKAN KEBIJAKAN TENTANG PENGADAAN SECARA TERBUKA

- Dipublikasikannya Peraturan Presiden No 16/2018 dan pedoman pelaksanaanya secara luas
- Sosialisasi ke seluruh Pemangku Kepentingan



MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN LEBIH AWAL

Memuat seluruh rencana pengadaan K/L/PD yang dilengkapi dengan Informasi Jenis Barang/jasa dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)



PENGUMUMAN TENDER

Kewajiban untuk mengumumkan Tender yang dicantumkan dalam Pasal 50 Perpres 16/2018

PRAKTIK TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



INFORMASI KRITERIA EVALUASI DALAM DOKUMEN PENGADAAN

Menggunakan Standar Dokumen Pemilihan, dilengkapi kriteria evaluasi, standar kontrak, dan jadwal pemilihan



PENGUMUMAN PEMENANG TENDER

Mewajibkan pengumuman pemenang Tender ataupun yang melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dalam Pasal 50 Perpres 16/2018



PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN PADA PELAKU PENGADAAN

Pengaturan tanggung jawab yang jelas antara PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen pengadaan, PPHP, Penyedia

PRAKTIK TRANSPARANSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



MEMPUBLIKASIKAN DAFTAR PENYEDIA YANG TERKENA SANKSI

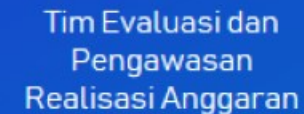
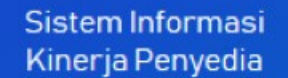
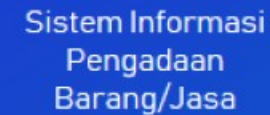
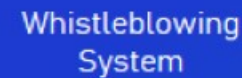
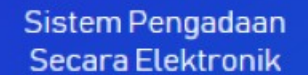
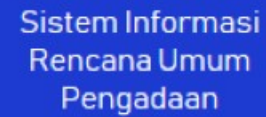
Penayangan Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dalam Portal Daftar Hitam Nasional



MENERAPKAN PERSYARATAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN BAGI PARA PELAKU PENGADAAN

Kewajiban Laporan Hasil Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN)

The image displays a responsive web application across three devices: a desktop monitor, a tablet, and a smartphone. The desktop monitor shows a table with 6 rows of data, including columns for 'No', 'Paket', 'Pkg', 'Jenis Pengiriman', 'Status', 'Penjualan', 'SKU/ID', 'Status Reply', 'Lokasi', and 'ID'. The tablet and smartphone show a simplified version of the interface with a header bar and a list of items.



Transparansi dalam Proses Pengadaan

	E-Procurement	Seluruh Proses Pengadaan menggunakan system elektronik sejak Perencanaan sampai Kontrak
	E-Katalog	Memuat Harga dan Penyedia Daftar Barang/Jasa secara terbuka dan dapat diakses oleh publik
	SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)	Memuat seluruh rencana pengadaan K/L/PD yang dilengkapi dengan Informasi Jenis Barang/jasa
Pengumuman Tender		Mewajibkan Pengumuman Tender
Pengumuman Pemenang		Mewajibkan pengumuman pemenang Tender ataupun yang melalui Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung
Transparansi dalam Proses (Pembukaan Dokumen Penawaran, Informasi Kontrak)		Menggunakan Standar Dokumen Pemilihan, dilengkapi kriteria evaluasi, standar kontrak

**PENCEGAHAN KONFLIK
KEPENTINGAN PADA PELAKU
PENGADAAN**

Pengaturan tanggung jawab yang jelas antara PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Agen pengadaan, PPHP, Penyedia

**PENANGANAN SANGGAH DAN
PENGADUAN**

Mekanisme Sanggah, Sanggah Banding, Pengaduan, Whistleblowing System

**PEMBERDAYAAN ORGANISASI
MASYARAKAT, MEDIA DAN PUBLIK
DALAM MENGAMATI PENGADAAN**

Terbukanya Informasi melau Portal pengadaan, SIRUP, Portal Pengaduan, e-Kontrak, e-Katalog, dan Portal Daftar Hitam bagi Ormas, media dan publik untuk mengamati proses pengadaan

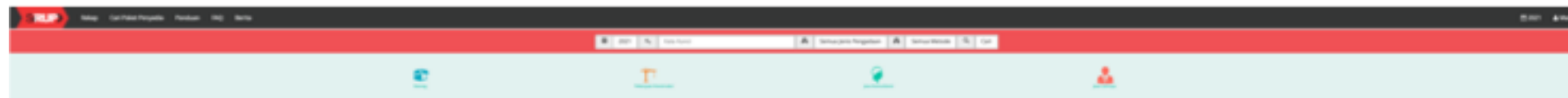
**PROFESIONALITAS PENGADAAN
DAN KELEMBAGAAN YANG
INDEPENDEN**

Pembentukan Jabatan Fungsional Pengadaan dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)

**PRAKTIK
AKUNTABILITAS
DALAM PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Pengenalan

SiRUP



*Data per 13 September 2021

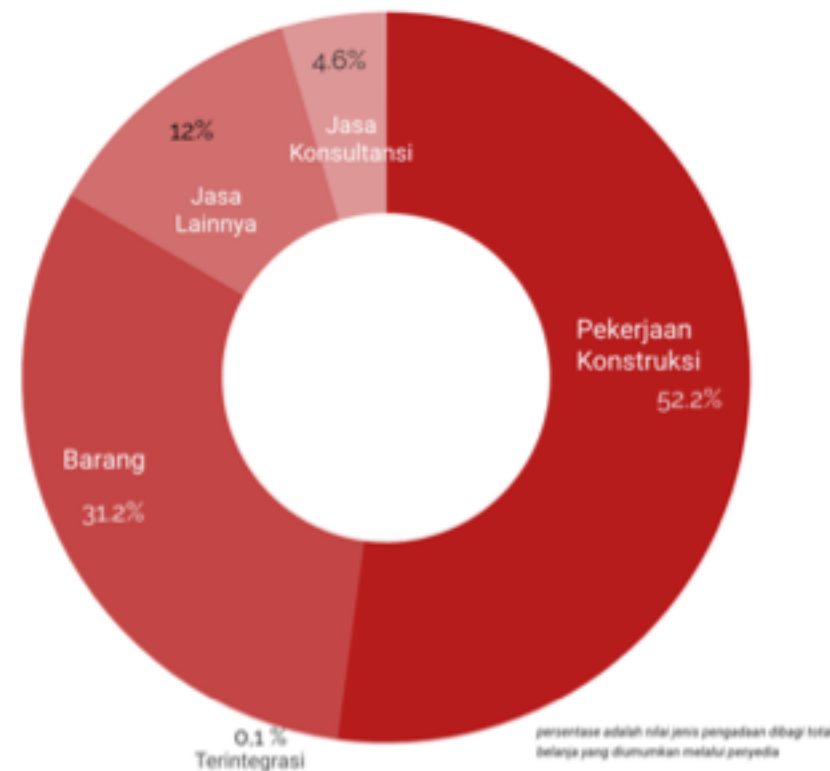
PELUANG PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN PEMERINTAH

Tertarik ikut Proyek Pemerintah?

Rp 619.85T

Alokasi belanja pengadaan pemerintah
yang diperuntukan bagi Pelaku Usaha

tersebar di **86 Kementerian/Lembaga**
dan **542 Provinsi/Kabupaten/Kota**



Pengenalan





[BERANDA](#) [CARI PAKET](#) [REGULASI](#) [KONTEN KHUSUS](#) [DAFTAR HITAM](#) [AMEL](#) [KONTAK KAMI](#) [PENDAFTARAN PENYEDIA](#) [LOGIN](#)



#KiniSaatnya #IkutTender

SIKaP

sikap.lkpp.go.id

Lengkapi data perusahaan Anda
dan cek inbox untuk informasi undangan tender

Login dengan akun SPSE Anda.
Dapatkan undangan tender cepat jika ada paket pengadaan
yang cocok dengan kualifikasi perusahaan Anda.



AYO IKUT TENDER!

DAFTAR DI SINI

#KiniSaatnya #IkutTender

Hubungi 144

FORM PENDAFTARAN PENYEDIA BARU

FORMULIR KEIKUTSERTAAN PENYEDIA BARU

<https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/publikasi> **KLIK DISINI**

FORMULIR PENDAFTARAN PENYEDIA BARU

[11 Januari 2021] - Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Secara Daring. [2 Agustus 2021] - Pelaksanaan verifikasi secara daring selama masa pencegahan

Tender -

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
	Pengadaan Barang		0
	Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Konstruksi		0
	Pekerjaan Konstruksi		1
1	- 3 Renovasi Ruang Pengaduan Pusat	spse 4.4 Tender	Rp. 713.616.000,00 22 September 2021 12:00

Pengumuman dan Berita -

20 September 2021 09:31
Pengumuman Pembatalan Tender Jasa EO Idea Series IDF Wilayah Timur (7570119)

20 September 2021 09:26
Pengumuman Pembatalan Tender Jasa EO Idea Series IDF Wilayah Tengah (7563119)

Tentang Kami Pakta Integritas Persyaratan dan Ketentuan
Total Pengunjung: 9.760.464
21 September 2021 21:30 WIB

© 2006-2021 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
SPSE v4.4u20210913



LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Akhir Presentasi
Terima Kasih

www.lkpp.go.id

LKPP